

PENGARUH MEKANISME *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN *MANDATORY DISCLOSURE* PASCA KONVERGENSI IFRS

Isna Fauziah

Sosial Trust Fund
isnafazi@gmail.com

Abstract. *The proportion of independent commissioners and the number of audit committee meeting. Data analysis method used is descriptive analysis method and hypothesis testing. The result in this study showed the average level of mandatory disclosure compliance after convergence of IFRS in statement comprehensive income is 59.73%. The result showed that corporate governance mechanism simultaneously affect the level of compliance with mandatory disclosure after convergence of IFRS. Meanwhile corporate governance mechanism variables that affect compliance are the managerial ownership, institutional ownership and the proportion of independent commissioners. Other variable that no affect is the numbers of audit committee meeting.*

Keywords: *level of compliance after convergence IFRS, mandatory disclosure, corporate governance mechanism*

Abstrak. *Penelitian ini bertujuan untuk menentukan tingkat kepatuhan mandatory disclosure pasca konvergensi IFRS pada laporan laba rugi komprehensif perusahaan manufaktur, selain itu ingin menguji pengaruh mekanisme corporate governance terhadap tingkat kepatuhan mandatory disclosure pasca konvergensi IFRS. Mekanisme corporate governance diukur dengan kepemilikan managerial, kepemilikan institusional, proporsi komisaris independen dan jumlah rapat komite audit. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan uji hipotesis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan tingkat kepatuhan mandatory disclosure rata-rata sebesar 59.73%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme corporate governance secara simultan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan mandatory disclosure pasca konvergensi IFRS. Sedangkan secara parsial menunjukkan variabel mekanisme corporate governance yang berpengaruh adalah kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan proporsi komisaris independen. Sedangkan variabel rapat komite audit tidak berpengaruh.*

Kata kunci: *tingkat kepatuhan pasca konvergensi IFRS, mandatory disclosure, mekanisme corporate governance*

PENDAHULUAN

Berkembangnya perekonomian global mempengaruhi perekonomian dalam negeri. Transaksi dan investasi kini tidak mengenal batas geografis. Dalam sebuah survei yang dilakukan oleh Federasi Akuntan Internasional (IFAC), sebagian besar pemimpin jasa akuntansi dari seluruh dunia menyepakati bahwa sudah diperlukan suatu standar pelaporan keuangan internasional sejalan dengan perkembangan ekonomi. Hasil survei tersebut adalah 55% responden dari berbagai negara sepakat bahwa adopsi IFRS sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi, 35% menyatakan penting, 9% menyatakan tidak terlalu penting, dan 1% menyatakan tidak penting. (Nurhayanto, 2010: 2).

Standar akuntansi internasional haruslah secara umum diterima sebagai aturan baku, yang didukung oleh sanksi-sanksi atas ketidakpatuhan untuk mendorong kualitas laporan keuangan yang memenuhi prinsip-prinsip komprehensif yang netral, konsisten, sebanding, relevan dan dapat diandalkan. (Situmorang, 2011:1) Maka jawaban, untuk menyelaraskan standar akuntansi dunia dimulai melalui *International Financial Reporting Standards* (IFRS). Pengadopsian IFRS di Indonesia diharapkan membuat perusahaan nasional dapat bersaing di dunia internasional.

Saat ini sudah lebih dari 115 negara mengadopsi IFRS. Maraknya negara-negara yang mengadopsi IFRS secara penuh seperti Australia, maka dalam kongres IAI X di Jakarta ditetapkan bahwa konvergensi IFRS akan diselesaikan pada tahun 2008. Target ketika itu adalah taat penuh dengan semua standar IFRS pada tahun 2008. Menurut Juan Ng Eng dan Ersya Tri Wahyuni (2012) beberapa kendala dalam harmonisasi PSAK ke dalam IFRS antara lain adalah minimnya sumber daya untuk mendukung anggota DSAK-IAI yang semua anggotanya adalah paruh waktu bekerja untuk pengembangan standar pelaporan. Kendala lainnya adalah IFRS yang sangat cepat berubah sehingga DSAK-IAI sulit untuk mengenjarnya.

Beberapa tahun terakhir, pengungkapan dan transparansi dalam laporan keuangan menjadi isu penting di Indonesia. Adanya kasus pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur di pasar modal menjadi bukti bahwa transparansi dan kepatuhan terhadap pengungkapan wajib masih kurang, terutama pada laporan laba rugi, misalnya kasus *mark-up* laporan keuangan PT Kimia

Farma, Tbk yang *overstated*, yaitu laba pada laporan keuangan yang seharusnya Rp99,594 miliar ditulis Rp 132,000 miliar sehingga terjadi penggelembungan laba bersih tahunan senilai Rp 32,668 miliar (Syahrul, 2002).

Terdapat dua sifat pengungkapan, yaitu pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). *Mandatory disclosure* mengacu pada informasi yang harus diungkapkan sebagai konsekuensi dari adanya ketentuan perundang-undangan, pasar saham, komisi bursa saham, atau peraturan akuntansi dari pihak yang berwenang, sedangkan *voluntary disclosure* merupakan informasi yang secara sukarela diungkapkan oleh perusahaan (Adina dan Ion, 2008). *Mandatory disclosure* bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi pengguna laporan keuangan, memastikan pengendalian kualitas kinerja melalui ketaatan terhadap hukum dan standar akuntansi yang berlaku, memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kesehatan keuangan perusahaan dan menghitung beban masa depan sehingga investor dapat menentukan kesempatan pertumbuhan jangka panjang dan memperkirakan aliran kas keluar untuk suatu bisnis (Al Akra. *et al.*, 2010).

Penerapan standar akuntansi berbasis IFRS belum dapat menjamin perusahaan akan melakukan pengungkapan yang lebih tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh Clemente dan Labat (2005) menyebutkan bahwa *corporate governance* mempengaruhi pengungkapan. Oleh karena itu diperlukan suatu sistem institusional yaitu *corporate governance* untuk mengawasi kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan. Menurut Hertanti (dikutip oleh Nafisah, 2011), arah perubahan sosial masyarakat Indonesia yang menuntut diterapkannya prinsip *corporate governance* bagi para pebisnis membuat isu pengungkapan semakin relevan untuk dikaji karena nilai keutamaan yang ada dalam *corporate governance* adalah *transparency*, *responsibility*, *fairness* dan *accountability*.

Corporate governance menjadi suatu hal yang penting untuk dilaksanakan mengingat seringkali terjadi konflik kepentingan antara pemegang saham atau komisaris dan para direktur dalam pengambilan keputusan (Hamzah dan Suparjan, 2009). Menurut Nofianti (2009), *good corporate governance* (GCG) diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan serta konsisten dengan peraturan perundang-undangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kausalitas yang digunakan untuk menjelaskan pengaruh mekanisme corporate governance terhadap tingkat kepatuhan mandatory disclosure konvergensi IFRS pada laporan keuangan. Ruang lingkup penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012 dan 2013. Pemilihan tahun pada penelitian ini dilakukan karena fokus penelitian ini dilakukan pasca konvergensi IFRS.

Sampel penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode setelah penerpan PSAK konvergensi IFRS periode 2012-2013. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif dilakukan dengan cara menganalisis suatu permasalahan yang diwujudkan dengan kuantitatif. Metode statistik yang digunakan untuk menganalisis data dan menguji hipotesis yaitu dengan menggunakan statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan uji hipotesis dengan menggunakan bantuan perangkat lunak SPSS (*Statistical Package for Social Sciences*) versi 20. Alasan penggunaan alat analisis regresi berganda adalah:

PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan unit analisis individu yakni perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2012 dan 2013. Perusahaan manufaktur tersebut telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebelum 1 Januari 2012 dan selama periode penelitian tersebut tidak mengalami *delisting*. Fokus penelitian ini adalah ingin mengukur tingkat kepatuhan perusahaan manufaktur dalam menyajikan dan mengungkapkan laporan laba rugi komprehensif dan melihat pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* pasca konvergensi IFRS.

Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk menentukan sampel adalah metode *purposive sampling*. Penelitian ini mengambil sampel selama 2 tahun yaitu tahun 2012 dan 2013. Penelitian secara *purposive sampling* mengindikasikan bahwa sampel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan representasi dari populasi yang ada dan sesuai dengan tujuan dari penelitian. Data yang digunakan

yaitu diambil dari Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan pada tahun 2012 dan 2013 yang diakses melalui website www.idx.co.id.

Jumlah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2012 dan 2013 berjumlah 258 perusahaan. Dari 258 perusahaan manufaktur tersebut 56 perusahaan yang tidak menerbitkan laporan tahunan dan laporan keuangan secara lengkap selama periode 2012 dan 2013, 45 perusahaan tidak menyajikan besarnya saham kepemilikan manajerial. 77 perusahaan yang tidak menyajikan laporan keuangan dalam bahasa Indonesia dan tidak menggunakan satuan mata uang rupiah untuk mendukung penelitian. Total perusahaan manufaktur yang dijadikan sampel adalah sebanyak 80 perusahaan.

Hasil Uji Analisis Data Penelitian

1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Penelitian ini menguji pengaruh mekanisme *good corporate governance* terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* pada laporan laba rugi komprehensif pasca konvergensi IFRS. Tahun pengamatan yang dilakukan adalah pada tahun 2012 dan tahun 2013. Pengukuran ini dilakukan berdasarkan *checklist* dari BAPEPAM-LK yang telah disesuaikan dengan IFRS.

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif diperoleh rata-rata skor pada tahun 2012 dan 2013 tentang tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* pasca konvergensi IFRS adalah 59.352 dan 60.125. Artinya pada tahun 2012 perusahaan telah menyajikan dan mengungkapkan laporan laba rugi komprehensif pasca konvergensi IFRS sebesar 59.35% item pengungkapan dan pada tahun 2013 telah mengungkapkan sebesar 60.12% item pengungkapan wajib. Selain itu dalam dua periode ini, perusahaan manufaktur telah mengalami peningkatan item pengungkapan wajib pada tahun 2013.

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif terhadap variabel kepemilikan manajerial (KEPMAN) memiliki nilai rata-rata 1.4. Nilai minimum sebesar 0.11, nilai maksimum sebesar 2.95 dan nilai standar deviasinya sebesar 0.88. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan manufaktur besarnya kepemilikan saham yang dimiliki pihak manajemen sebesar 1.40%. Variabel kepemilikan institusional (KEPINS) menunjukkan nilai rata-rata sebesar 85.73. Nilai minimum sebesar 74 dan nilai maksimumnya sebesar 92.

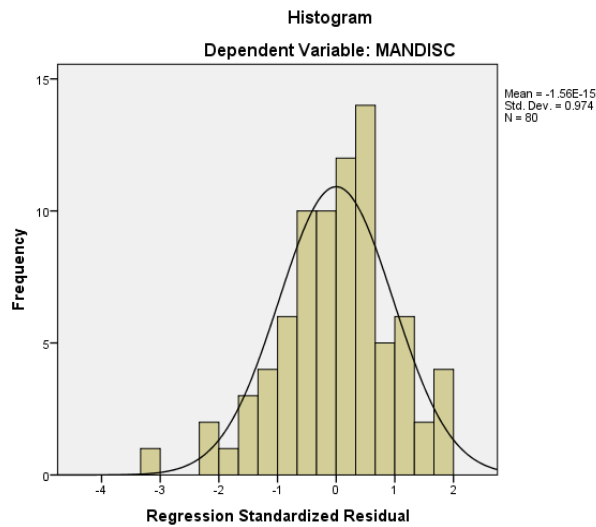
Artinya rata-rata besarnya kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak institusional pada perusahaan manufaktur sebesar 85.73%. Investor yang berasal dari institusional pada perusahaan manufaktur melebihi 50% kepemilikan saham. Variabel proporsi komisaris independen (KOMIND) menunjukkan nilai rata-rata sebesar 31.9. Nilai minimum 0 dan maksimum 67. Artinya struktur *corporate governance* pada perusahaan manufaktur rata-rata memiliki komposisi komisaris independen dengan persentase 31.56%. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan telah mengikuti aturan BAPEPAM dimana dalam perusahaan memiliki komposisi komisaris independen sekurang-kurangnya 30%. Walaupun demikian, masih ada perusahaan yang tidak memiliki komisaris independen, hal ini ditunjukkan pada tabel minimum dengan skor 0. Variabel rapat komite audit memiliki nilai minimum 2 dan nilai maksimum 12 serta rata-rata sebesar 5.69. Artinya perusahaan manufaktur telah melaksanakan rapat komite audit lebih dari 4 kali dalam setahun. Hal ini telah sesuai dengan peraturan BAPEPAM yang menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan rapat komite audit minimal dilaksanakan minimal 3 sampai 4 kali dalam satu tahun. Namun masih ada perusahaan manufaktur yang hanya melaksanakan rapat komite audit 2 kali dalam setahun.

2. Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Hasil Uji Normalitas

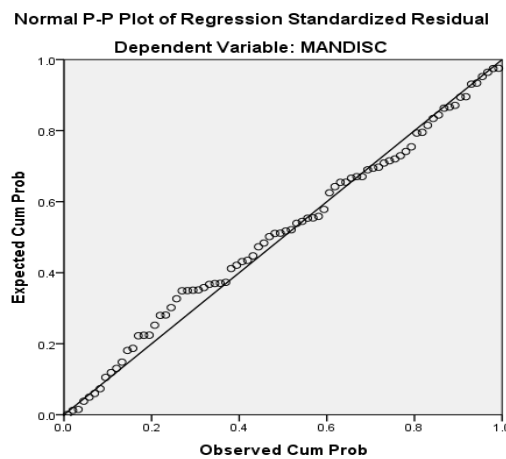
Jika angka probabilitas kurang dari 0.05 maka variabel ini tidak terdistribusi secara normal. Sebaliknya, bila angka probabilitas diatas 0.05 maka H_0 ditolak yang berarti variabel terdistribusi secara normal (Ghozali, 2011). Berdasarkan hasil uji diketahui bahwa besarnya nilai signifikansi adalah 0.851 hal ini berarti data residual terdistribusi secara normal karena tingkat signifikansinya diatas 0.05. Artinya model regresi tidak memiliki masalah normalitas data atau data yang digunakan terdistribusi secara normal. Selain melihat dari hasil uji Kolmogorov-Smirnov diatas, kenormalan distribusi data juga dapat dilihat melalui histogram *normality* dan grafik normal *probability plot* berikut:

Gambar 1
Hasil Uji Normalitas dengan Histogram *Normality*



Gambar histogram dibawah ini terlihat mengikuti bentuk normalitas yang berbentuk lonceng dan plot regresi terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal sehingga dalam penelitian ini tidak terjadi gangguan normalitas, dengan kata lain berarti data penelitian ini berdistribusi normal.

Gambar 2
Hasil Uji Normalitas dengan Grafik *Normality Probability Plot*



b. Hasil Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas merupakan suatu bentuk pengujian untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat adanya korelasi atau hubungan yang linier antar variabel bebas (independen). Salah satu cara untuk mengetahui ada tidaknya

multikolinearitas pada suatu model regresi adalah dengan melihat nilai *tolerance* dan VIF (*Variance Inflation Factor*). Jika nilai *tolerance* > 0.10 dan VIF < 10 , maka dapat diartikan bahwa tidak terdapat multikolinearitas pada penelitian tersebut. Dan sebaliknya, jika nilai *tolerance* < 0.10 dan VIF > 10 maka terjadi multikolinearitas (Ghozali, 2011).

Kepemilikan manajerial mempunyai nilai *tolerance* sebesar 0.95 dan nilai VIF sebesar 1.053. Variabel kepemilikan institusional (KEPINS) mempunyai nilai *tolerance* sebesar 0.938 dan nilai VIF sebesar 1.066. Variabel komposisi komisaris independen (KOMIND) memiliki nilai *tolerance* sebesar 0.977 dan nilai VIF sebesar 1.024. Variabel rapat komite audit (RKOMA) memiliki nilai *tolerance* sebesar 0.948 dan VIF sebesar 1.055.

Berdasarkan terlihat bahwa nilai *tolerance* untuk semua variabel independen lebih dari 0.10 dan nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) semua variabel independen kurang dari 10. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa model persamaan regresi mengindikasikan tidak terjadi adanya multikolonieritas (Ghozali, 2011).

c. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dilakukan dengan dengan menjalankan uji Glejser pada aplikasi SPSS 20.0. Nilai signifikansi yang kurang dari 5% menunjukkan bahwa terdapat masalah heterokedastisitas pada variabel yang diuji (Ghozali, 2011). Berikut hasil uji heterokedastisitas pada model penelitian. Hasil uji heteroskedastisitas pada tabel diatas menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen nilai absolute residual (ABS_RES1). Hal ini terlihat dari probabilitas signifikansinya diatas tingkat kepercayaan 5%. Jadi dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas

(Ghozali, 2011). Sehingga model regresi layak digunakan untuk memprediksi tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* pasca konvergensi IFRS berdasarkan variabel yang mempengaruhinya yaitu, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, proporsi komisaris independen dan rapat komite audit.

d. Hasil Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Deteksi adanya autokorelasi dapat dilihat dari angka *Durbin Watson*. Hasil uji autokorelasi dengan menggunakan *Durbin Watson* menunjukkan angka 1.667. Angka tersebut terletak antara -2 dengan 2, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi dalam penelitian ini (Sunyoto, 2011).

3. Hasil Uji Hipotesis

a. Hasil Koefisien Determinasi

Nilai koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) sebesar 0.131. Hasil ini berarti bahwa ada kontribusi sebesar 13.1% dari variabel independen (kepemilikan manajemen, kepemilikan institusional, komisaris independen dan rapat komite audit) dalam menentukan tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* pasca konvergensi IFRS pada Laporan Keuangan perusahaan manufaktur yang menjadi target populasi. Sedangkan sisanya 86.9% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Diduga variabel lainnya yang mempengaruhi adalah jumlah anggota komite audit (Prawinandi, 2012), Ukuran Perusahaan (Ferry, 2010) Ukuran KAP yang mengaudit (Ferry, 2010; Akmyga dan Farahmita, 2013), Efektivitas Komite Audit (Indah, 2014), Jumlah Rapat Dewan Komisaris (Dwi Utami, 2012), Latar Belakang Pendidikan Komisaris Independen (Prawinandi, 2012; Suhardjanto, 2011).

b. Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh masing-masing variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Berdasarkan data olahan hasil SPSS 20 *for windows*, didapat sebagai berikut:

Tabel 1
Hasil Uji Statistik t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	41.223	6.314		6.529	.000
1 KEPMAN	.951	.433	.236	2.197	.031
KEPINS	.175	.073	.258	2.384	.020
KOMIND	.054	.024	.239	2.253	.027
RKOMA	.081	.124	.070	.649	.519

a. Dependent Variable: MANIDSC

Sumber: Data diolah (2015)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa variabel independen yaitu kepemilikan manajerial (KEPMAN) berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* (MANDISC) dengan tingkat signifikansi sebesar 0.031 lebih kecil dari 0.05. Selanjutnya variabel kepemilikan institusional (KEPINS) berpengaruh dengan tingkat signifikan 0.020 nilai ini lebih besar dari 0.05. Pada variabel komisaris independen (KOMIND) menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0.027 dimana angka ini lebih kecil dari 0.05, artinya variabel ini berpengaruh.

Variabel jumlah rapat komite audit memiliki nilai signifikansi 0.519 dimana nilai ini lebih besar dari nilai 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel jumlah rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*.

Setelah melakukan uji t seperti yang terteta pada tabel 1 maka persamaan regresi yang terbentuk dalam penelitian ini yaitu:

$$Y = 41.223 + 0.951X_1 + 0.175X_2 + 0.054X_3 + 0.081 X_4$$

Pada persamaan regresi diatas maka dapat diartikan bahwa nilai konstanta sebesar 41.223, hal ini menunjukkan jika variabel independen dianggap tidak ada atau nilai 0 maka akan terjadi peningkatan tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*

sebesar 41.223. Koefisien regresi untuk variabel kepemilikan manajerial sebesar 0.951 menunjukkan bahwa setiap adanya perubahan 1 satuan kepemilikan manajerial maka akan dapat menaikkan variabel tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* sebesar 0.951. Koefisien regresi untuk variabel kepemilikan institusional sebesar 0.175 menunjukkan bahwa setiap adanya perubahan 1 satuan kepemilikan institusional maka akan menaikkan tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* sebesar 0.175. Selanjutnya koefisien untuk variabel komisaris independen sebesar 0.054 yang artinya akan ada kenaikan sebesar 0.054 pada tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* apabila ada pertambahan 1 satuan di variabel ini.

c. Uji Signifikansi Parameter Simultan (Uji Statistik F)

Uji F bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh secara bersama-sama antara variabel-variabel independen (kepemilikan publik, kepemilikan institusional, komisaris independen dan rapat komite audit) terhadap variabel dependen (tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* pasca konvergensi IFRS). Pengujian dilakukan dengan nilai probabilitas yaitu apabila probabilitas lebih kecil dari taraf signifikansi (5%) maka model diterima. Berikut hasil uji statistik F pada model penelitian:

Tabel 2
Hasil Uji Statistik F

Model		Sum of Squares	df	F	Sig.
1	Regression	174.939	4	3.988	.005 ^b
	Residual	822.451	75		
	Total	997.390	79		

a. Dependent Variable: MANIDSC

b. Predictors: (Constant), RKOMA, KOMIND, KEPMAN, KEPINS

Dari tabel 2 diatas diketahui nilai F sebesar 3.988 dengan nilai signifikansi sebesar 0.005. Tabel tersebut menunjukkan bahwa variabel independen penelitian secara simultan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* pasca konvergensi IFRS. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai F pada tingkat signifikansi 0.005 lebih kecil dari 0.05.

1. Pengaruh antara Kepemilikan Manajerial dengan Tingkat Kepatuhan *Mandatory disclosure* Pasca Konvergensi IFRS

Hasil uji koefisien regresi linier berganda menunjukkan bahwa nilai t sebesar 2.197 dengan tingkat signifikansi sebesar $0.031 < 0.05$. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan Manajerial (KEPMAN) berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* pasca konvergensi IFRS (MANDISC). Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ferry Diyanti (2010) bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* pasca konvergensi IFRS. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian Utami, dkk. (2012).

Manajemen sangat berperan dalam menjalankan kelangsungan usaha suatu perusahaan. Kepemilikan saham manajerial suatu perusahaan yang semakin tinggi menyebabkan semakin besar pula tanggung jawab yang diemban. Hal ini disebabkan karena manajemen tidak hanya berperan sebagai pengelola perusahaan saja melainkan juga berperan sebagai pemegang saham. Manajer memiliki insentif yang lemah untuk bertindak sesuai kepentingan pemegang saham sehingga diperlukan kepemilikan manajerial untuk memotivasi manajer agar dapat memaksimalkan kinerjanya (Al-Fayoumi et al., 2010), diantaranya ketaatan terhadap pengungkapan wajib yang disyaratkan oleh standar. Menurut Beasley (1996), pihak manajemen yang memiliki saham perusahaan memiliki insentif lebih besar untuk melakukan monitoring sehingga akan mengurangi kecurangan atau ketidakpatuhan pada pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dalam pelaporan keuangan. Pihak manajer akan mematuhi peraturan yang ada dengan mengungkapkan informasi selengkap mungkin karena hal ini berkaitan dengan penilaian kinerja yang telah dilakukan sebagai pengelola perusahaan dan dengan memberikan informasi selengkap mungkin, maka hal ini dapat mendukung tingkat kepercayaan investor terhadap kinerja manajemen pada perusahaan secara keseluruhan.

Manajemen akan bertanggung jawab atas seluruh kegiatan usaha yang telah dilakukannya dengan melakukan pengungkapan yang diwajibkan dalam

laporan keuangan perusahaan. Manajemen berusaha untuk memberikan informasi tentang perusahaan dengan mengungkapkannya dalam laporan keuangan. Pengungkapan dalam laporan keuangan menunjukkan bahwa manajemen telah bertanggung jawab atas perannya baik sebagai pengelola perusahaan maupun sebagai pemegang saham.

2. Pengaruh antara Kepemilikan Institusional terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory disclosure* Pasca Konvergensi IFRS.

Hasil uji koefisien regresi linier berganda menunjukkan bahwa nilai t sebesar 2.834 dengan signifikansi sebesar 0.020. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* pasca konvergensi IFRS yang sesuai dengan peraturan BAPEPAM-LK. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ferry Diyanti (2010) dan Utami dkk., (2012). Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemegang saham luar yang merupakan suatu institusi, perusahaan, lembaga asuransi, bank dan dana pensiun (Eng dan Mak, 2003). Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif. Besarnya saham yang dimiliki oleh institusi dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan (Boediono, 2005). Hasil penelitian ini mendukung teori yang diungkapkan oleh Godfrey dan Jones (1999) serta Simanjuntak dan Widiastuti (2004) dimana perusahaan yang porsi sahamnya semakin banyak dimiliki oleh publik maka akan memiliki tingkat pengendalian dan pengawasan terhadap manajemen perusahaan yang semakin baik.

Mekanisme ini berjalan dengan baik ketika pemegang saham dari luar perusahaan berlaku kritis terhadap kinerja yang telah dilakukan oleh manajemen perusahaan. Sikap kritis ini akan mendorong pengungkapan informasi yang lebih komprehensif, melakukan pengungkapan informasi selengkap mungkin sehingga secara langsung akan mendorong perusahaan untuk mematuhi peraturan dalam melakukan pengungkapan wajib sesuai dengan peraturan BAPEPAM-LK yang telah konvergensi dengan IFRS. Hal tersebut dikarenakan semakin tingginya tuntutan dari publik untuk

memberikan informasi yang selengkap mungkin, terutama pihak investor yang mempunyai saham di perusahaan tersebut. Tujuannya untuk pengambilan keputusan sehingga akan memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi ekonomi perusahaan tersebut kepada publik dan pemegang saham. Artinya, dengan dimilikinya saham oleh suatu instansi yang professional, perusahaan akan dimonitor dan dievaluasi secara teliti sehingga perusahaan menyajikan dan mengungkapkan laporan keuangan dengan lengkap dan sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh BAPEPAM-LK yang telah disesuaikan dengan IFRS.

3. Pengaruh antara Komposisi Komisaris Independen dengan Tingkat Kepatuhan *Mandatory disclosure* Pasca Konvergensi IFRS

Hasil uji koefisien regresi linier berganda menunjukkan bahwa nilai t sebesar 2.253 dengan signifikansi sebesar 0,027. Hal ini menunjukkan bahwa komposisi komisaris independen berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* pasca IFRS. Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan penelitian Cheng dan Jaggi (2000), Young *et. al.*, (2001), Baroko (2007), Huafang dan Jianguo (2007), Ferry Diyanti (2010) dan Wardani Prawindi (2012).

Dewan komisaris mewakili mekanisme internal utama untuk mengontrol perilaku oportunistik manajemen sehingga dapat membantu menyelaraskan kepentingan pemegang saham dan manajer. Keberadaan dewan komisaris independen mempunyai peranan dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap perusahaan dalam hal transparansi kepada pihak public sehingga perusahaan cenderung untuk mematuhi peraturan yang diatur oleh BAPEPAM. Fungsi dewan komisaris termasuk anggota komisaris independen adalah mencakup dua peran sebagai berikut: pertama, mengawasi direksi perusahaan dalam mencapai kinerja dalam business plan dan memberikan nasehat kepada direksi mengenai penyimpangan pengelolaan usaha yang tidak sesuai dengan arah yang ingin dituju oleh perusahaan. Kedua, memantau penerapan dan efektifitas dari praktek GCG. Fungsi dan tugas dewan komisaris independen ini dapat berjalan dengan baik jika setiap

kebijakan dan keputusan dewan komisaris yang dikeluarkan tidak memihak kepentingan tertentu.

Adanya pengaruh ini disebabkan karena dengan makin besarnya proporsi komisaris independen maka proses pengawasan yang dilakukan dewan ini makin berkualitas dengan makin banyaknya pihak independen dalam perusahaan yang menuntut adanya transparansi dalam pelaporan keuangan perusahaan (Nasution dan Setiawan, 2007). Muntoro (2005) juga menjelaskan bahwa komisaris independen diperlukan untuk meningkatkan independensi dewan komisaris terhadap kepentingan pemegang saham (mayoritas) dan benar-benar menempatkan kepentingan perusahaan diatas kepentingan lainnya. Hasil penelitian ini sejalan dengan yang telah dilakukan Huafang dan Jiangguo (2007) yang menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan.

4. Pengaruh antara Jumlah Rapat Komite Audit dengan Tingkat Kepatuhan *Mandatory disclosure* Pasca Konvergensi IFRS

Hasil uji koefisien regresi linier berganda menunjukkan bahwa nilai t sebesar 0.881 dengan signifikansi sebesar 0.519. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* pasca konvergensi IFRS. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Dwi Utami (2012). Penjelasanannya adalah jumlah rapat komite audit dalam perusahaan hanya bersifat *mandatory* terhadap peraturan yang ada. Rapat/pertemuan komite audit jarang dikoordinasikan dan dikomunikasikan dengan pihak manajemen maupun auditor eksternal. Sehingga masalah-masalah yang terdapat dalam proses penungkapan dan penyusunan pelaporan keuangan tidak terungkap dan tidak diketahui oleh manajemen perusahaan. (Pamundji dan Trihartati, 2010). Namun hasil bertentangan dengan Anggita Pitasari (2010) dan Ettredge, *et. al.*, (2010) yang menyimpulkan bahwa frekuensi rapat komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan. Semakin tinggi intensitas pertemuan yang diadakan memungkinkan komite audit secara intens membahas tentang hal-hal penting pada penyusunan laporan keuangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan data yang dikumpulkan dan hasil pengujian yang telah dilakukan dengan menggunakan uji regresi linier berganda, dan pembahasan pada bagian sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* pasca konvergensi IFRS. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ferry Diyanti (2010) dan Utami, dkk. (2012).
2. Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* pasca konvergensi IFRS. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ferry Diyanti (2010) dan Utami, dkk. (2012).
3. Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* pasca konvergensi IFRS. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ferry Diyanti (2010), Prawinandi (2012).
4. Jumlah rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* pasca konvergensi IFRS. Hal ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Utami, dkk. (2012).

Penelitian ini dimasa mendatang diharapkan dapat menyajikan hasil penelitian yang lebih berkualitas lagi dengan adanya beberapa masukan mengenai beberapa hal diantaranya:

1. Penelitian lebih lanjut disarankan untuk menambah variabel independen lainnya seperti ukuran perusahaan, kualitas audit, jumlah anggota komite audit, *managerial power* dan *proprietary cost*.
2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah jumlah tahun penelitian.
3. Penelitian selanjutnya sarankan meneliti perusahaan sektor lain selain sektor manufaktur atau meneliti seluruh laporan keuangan. Dengan demikian akan diketahui tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* pasca konvergensi IFRS pada seluruh laporan keuangan disemua sektor.

REFERENSI

- Adina, P., dan P. Ion. 2008. Aspect Regarding Corporate Mandatory and Voluntary Disclosure. *Annals Faculty of Economics Journal* 3 (1): 1407-1411.
- Akmyga, Stalsa Frani dan Aria Farahmita, "Pengaruh Struktur Corporate Governance terhadap Luas Pengungkapan Kompensasi Manajemen Kunci di Laporan Keuangan", Simposium Nasional Akuntansi XVI, Manado, 2013.
- Al- Akra,M., I. A., Eddie dan M. J. Ali. 2010. The Influence of The Introduction of Accounting Disclosure Regulation on Mandatory Disclosure Compliance: Evidence from Jordan. *The British Accounting Review* 7 (1): 1-20.
- Al-Fayoumi, N, Abuzayed, B & Alexander, D 2010, 'Ownership structure and earnings management in emerging markets: The case of Jordan', *International Research Journal of Finance and Economics*, vol.38, pp28-47.
- Alijoyo, F.A. 2003. Keberadaan dan Peran Komite Audit Dalam rangka Implementasi GCG. Seminar Nasional FKSPI BUMN/BUMND Wilayah Jawa Timur.
- Anyta, Niyanti. 2012. Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Nilai Perusahaan dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility dan Struktur Good Corporate Governance sebagai Variabel Pemoderasi. <http://eprints.undip.ac.id/36171/1/ANGGITASARI.pdf>. 20 Juni 2013.
- Badan Pengawas Pasar Modal dan Laporan Keuangan, Kep-41/PM/2003 pada peraturan No. IX.I.5. *Pembentukan dan Pelaksanaan Kerja Komite Audit*, Jakarta, 2003.
- Badan Pengawas Pasar Modal dan Laporan Keuangan, Kep-29/PM/2004 pada peraturan No. IX.I.5. *Pembentukan dan Pelaksanaan Kerja Komite Audit*, Jakarta, 2004.
- BAPEPAM. 2000. *SE- 03/PM/2000* tanggal 5 Mei 2000 tentang Pembentukan Komite Audit Emiten dan Perusahaan Publik.
- BAPEPAM. 2002. Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik, *Lampiran 1 Surat Edaran Ketua Bapepam No : SE-02/PM/2002*.
- BAPEPAM. 2012. Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik yang Konvergen dengan IFRS, Kep – 347/BL/2012.

- Barako, D.G. 2007. Determinants of Voluntary Disclosures in Kenyan Companies Annual Reports. *African Journal of Business Management* 1(5): 113-128.
- Barros, Carlos.P, Sabri Boubaker, dan Amal Hamrouni, "Corporate Governance and Voluntary Disclosure in France", *Journal of Applied Business Research*, Vol. 29, No. 2, 2013.
- Bassett, Michael, Ping-Sheng Koh, dan Irene Tutticci, "The Association Between Employee Stock Option Disclosures and Corporate Governance: Evidence from An Enhanced Disclosure", *Regime. The British Accounting Review* 39 (4): 303-322, 2007.
- Belkaoui, Ahmed Riahi. 2007. Accounting Theory. Buku Satu dan Dua. Salemba Empat: Jakarta.
- Boediono, Gideon SB., 2005. Kualitas Laba: Studi Pengaruh Mekanisme corporate Governance dan dampak Manajemen Laba dengan Menggunakan Analisis Jalur. Simposium Nasional; Akuntansi 8 : Ikatan Akuntan Indonesia.
- BUMN. 2002. Tentang Pembentukan Komite Audit Bagi Badan Usaha Milik Negara. www.jariungu.com/peraturan_detail.php?Keputusan-Menteri-BUMN-No--KEP-103-MBU-2002--tentang-Pembentukan-Komite-Audit-Bagi-Badan-Usaha-Milik-Negara&idPeraturan=14894.
- Carcello, J. V., dan T. L. Neal. 2002. Disclosure in audit committee characteristics report. *Accounting Horizon* 16 (4): 291-304.
- Chakroun, Raida dan Hamadi Matoussi, "Determinants of The Extent of Voluntary Disclosure in The Annual Reports of The Tunisian Firms", *Accounting and Management Information Systems*, Vol. 11, No. 3, Pp. 335-370, 2012.
- Chen, Carl R. and Thomas L. Steiner, 2000, *Tobin's Q, Managerial Ownership, and Analyst Coverage, A Nonlinear Simultaneous Equation Model*, *Journal of Economic and Business*; 52, pp. 365-382.
- Chen, G., M. Firth, dan L. Xu. 2009. "Does the Type of Ownership Control Matter? Evidence from China's Listed Companies." *Journal of Banking & Finance*, Vol. 33, pp. 171-181.
- Chen, J.P, Charles, dan BL. Jaggi. 2000. The Association between independent nonexecutive directors, family control and financial disclosures in Hong Kong. *Journal of Accounting and Public Policy*. 19(4): 285-310.

- Choi, Frederick D.S., Carol Ann Frost, Garry K Meek. 1999. *International Accounting. 3th Edition*. United States: Prentice Hall International.
- Clemente, A.G. dan B.N. Labat. 2005. Corporate Governance Mechanisms and Voluntary Disclosure: The Role of Independent Directors in The Boards of Listed Spanish Firm.
- Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics* (3): 305-360.
- Denis, D.K. dan McConnell, J.J. (2003). "International Corporate Governance." Working Paper of Purdue University.
- Dennis, Diane dan John McConnell, 2003. International Corporate governance, *Journal of Financial and Quantitative Analysis*. 38: 1-36.
- Diyanti, Ferry. 2010. Mekanisme *Good Corporate Governance*, Karakteristik Perusahaan dan *Mandatory Disclosure*: Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI. Publikasi Ilmiah Program Magister Sains Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Elias, Nabil. 2012. "The Impact of Mandatory IFRS Adoption on Accounting Quality: Evidence from Australia". *Journal of International Accounting Research* Vol. 11 No. 1, pp. 147-154.
- El-Gazzar S, Finn P, Jacob R (1999). An Empirical Investigation of Multinational Firm Compliance with International Accounting Standard". *International Journal Of Accounting*. 34(2): 239-248.
- Eng, L. L. & Mak, Y.T. (2003). Corporate governance and voluntary disclosure. *Journal of Accounting and Public Policy*, 22, 325-345.
- Ettredge, M., K. Johnstone, M. Stone dan Q. Wang. 2010. *The Effect of Firm Size, Corporate Governance Quality, and Bad News on Disclosure Compliance. Review of Accounting Studies, Forthcoming*: 1-34.
- Farichah. 2009. Analisis hubungan Antara Karakteristik dan Kualitas pengungkapan pada Laporan Keuangan Perusahaan Indonesia. *Jurnal Akuntansi Keuangan*. ISSN 1410 -1831. Lampung.
- Gamayuni, R. Rindu. 2009. *Perkembangan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia Menuju International Financial Reporting Standards*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* Vol.14, No.2.

- Ghozali, Imam, *"Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS"*. Edisi Ke-Lima. Universitas Diponegoro Semarang, 2011.
- Ghozali, Imam. 2011. *"Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS"*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hamid, Abdul, *"Buku Panduan Penulisan Skripsi"*, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2012.
- Hamzah, M.Z., dan Suparjan, A. 2009. Pengaruh Karakteristik Corporate Governance Terhadap Struktur Modal. *Media Riset Akuntansi, Auditing dan Informasi*, Vol. 9, No. 1, April 2009.
- Hapsoro, Dody. 2007. "Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap transparansi: Studi Empiris di Pasar Modal Indonesia. *Jurnal Akuntansi & Manajemen* Vol. 18 No.2 Agustus 2007, 65: 148.
- http://www.bapepam.go.id/pasar_modal/regulasi_pm/peraturan_pm/ diakses pada 19 september 2014.
- http://www.cicfcgi.org/news/files/Pedoman_GCG_060906.pdf. Diakses 19 September 2014.
- Herwidayatmo. 2000. *Implementasi Good Corporate Governance Untuk Perusahaan Publik di Indonesia*. Majalah Usahawan No. 10. Th XXIX, Oktober: 25-32.
- Huafang, X. dan Y. Jianguo. 2007. Ownership Structure, Board Composition and Corporate Voluntary Disclosure: Evidence From Listed Companies in China. *Managerial Auditing Journal* 22 (6): 604-619.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2007. "Standar Akuntansi Keuangan". Jakarta: Salemba Empat.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo, *"Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen"*. Edisi Pertama, Cetakan Ketiga. BPFE: Yogyakarta. 2002.
- J. Susilo, Leo & Karlen Simarmata, *Good Corporate Governance pada Bank : Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris dalam Melaksanakannya*, Bandung : Hikayat Dunia, 2007.
- Jaggi B, Low P (2000). Impact of Culture, Market Forces, and Legal System of Financial Disclosure.
- Jensen, M.C. dan W.H. Meckling. 1976. Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics* (3): 305-

360.

- Juan, Ng Eng dan Wahyuni Tri Ersu, "Panduan Praktis Standar Akuntansi Keuangan Berbasis IFRS", Edisi 2, Salemba Empat, Jakarta, 2012.
- Junaid, Shaikh. 2004. Measuring and Reporting of Intellectual Capital Performance Analysis. *Journal Of American Academy of Bussiness Cambridge*.
- Junaidi. 2006. Pengaruh Kepemilikan Managerial dan Kepemilikan Institusional Terhadap Kebijakan Hutang Perusahaan: Sebuah Perspektif *Agency Theory* Dengan Variabel Kontrol *Dividend Payout Ratio*, Ukuran Perusahaan, *Assets Structure* dan Risiko Bisnis (Studi pada Perusahaan yang Go Publik di Bursa Efek Jakarta). **Jurnal Ilmiah Bidang Manajemen dan Akuntansi**. Vol. 3. No. 2. September. hlm. 214-228.
- Karim. 2005. Regulatory Change and The Quality of Compliance to Mandatory Disclosure Requirements: Evidence from Bangladesh. Working Paper.
- Kent, P. dan J. Stewart. 2008. *Corporate Governance and Disclosures on The Transition to International Financial Reporting Standards*. Bond University Business Papers. http://epublications.bond.edu.au/business_pubs/130. Diakses 19 September 2011.
- Khomsiyah dan Susanti, "Pengungkapan, Asimetri Informasi, dan Cost of Capital". Makalah Simposium Nasional Akuntansi VII, Surabaya, 2003.
- Komite Nasional Kebijakan Governance. 2006. *Pedoman Umum Good Corporate Governance*. Jakarta.
- Komite Nasional Kebijakan Governance, "Pedoman Good Corporate Governance", Jakarta, 2006.
- Lins, K.V. dan F.E. Warnock. 2004. Corporate Governance and the Shareholder Base. *International Finance Discussion Papers* (816).
- Muntoro, R.K. 2006. *Membangun Dewan Komisaris Yang Efektif*. Artikel Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. http://www.lmfeui.com/data/mui/Membangun%20Dewan%20Komisaris%200%20yan_g%20Efektif%20Ronny%20K%20Muntoro.pdf. Diakses 19 September 2014.

- Mensah, Ben K. Agyei. 2013. *Adoption of International Financial Reporting Standard (IFRS) in Ghana and The quality of Financial Statement Disclosure*. International Journal Accounting and Financial Reporting. ISSN.2162-3082.
- Mursalim. 2007. "Simultanitas Aktivisme institusional, Struktur Kepemilikan, Kebijakan Dividen dan Utang dalam Mengurangi Konflik Keagenan". Makalah disampaikan pada *Simposium Nasional Akuntansi X*. Makasar.
- Na'im, Ainun dan Fu'ad Rakhman. 2000. Analisis Hubungan antara Kelengkapan Pengungkapan Laporan Keuangan dengan Struktur Modal dan Tipe Kepemilikan Perusahaan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*. 15 (1): 70-82.
- Nasution, Marihot dan Doddy Setiawan, "Pengaruh Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba di Industri Perbankan Indonesia", Simposium Nasional Akuntansi X Makassar: 1-26, 2007.
- Novianti, L. 2009. Penerapan Good Corporate Governance (GCG) di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 14 (2): 211-232.
- Nurharyanto. (2010, Nopember). Pada Makalah Seminar Pusdiklatwas dan Satgas IFRS Deputy Akuntan Negara BPKP. *International Financial Reporting Standards (IFRS) Konvergensi dan Potensi Kendala Implementasinya di Indonesia..* Bogor : Widyaaiswara – Pusdiklatwas BPKP.
- Pamudji, S. dan A. Trihartati. 2010. *Pengaruh Independensi dan Efektifitas Komite Audit Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI)*. Artikel Universitas Diponegoro Semarang. ejournal.undip.ac.id/index.php/akuditi/article/download/176/105. Diakses 7 Maret 2012.
- Pangaribuan, Andrea Anggiat. 2011. Evaluasi Proses Penatausahaan dan Akuntansi Pemerintah Kota Yogyakarta. S1 Thesis. UAYJ E-Library.
- Pitasari, Anggita. 2014. Analisis pengaruh Struktur Corporate governance terhadap Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Konvergensi IFRS pada Laporan Laba Rugi Komprehensif. Semarang: Universitas Dipenogoro.
- Prawinandi, W., Suhardjanto, D., dan H. Triatmoko. 2012. Peran Struktur *Corporate Governance* dalam Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* Konvergensi IFRS. *Simposium Nasional Akuntansi XV*.

- Prihadi, Toto. 2011. *Praktis Memahami Laporan Keuangan Sesuai IFRS & PSAK*. Jakarta: Penerbit PPM.
- Purba, Marisi P.(2010). *International Financial Reporting Standards Konvergensi dan Kendala Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Puspitasari, Apriani Daning. 2009. "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) pada Laporan Tahunan Perusahaan di Indonesia". *Tesis*. Tidak dipublikasikan Universitas Diponogoro Semarang.
- Rahcmawati, Andri dan Hanung Triatmoko. 2007. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laba dan Nilai Perusahaan. SNA 10: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Rahmawati, Andri dan Hanung Triatmoko. 2007. Analisis faktor-Faktor yang mempengaruhi Kualitas Laba dan Nilai Perusahaan. SNA 10 : Ikatan Akuntan Indonesia.
- Rakhmawati, Desie. 2011. *Pengaruh Struktur Kepemilikan, Tipe Industri, Ukuran Perusahaan, Perusahaan BUMN dan Non BUMN Terhadap Luas Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial (CSR DISCLOSURE) pada Perusahaan di BEI Tahun 2009*. Skripsi. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Rawi dan Munawar Muchlish. 2010. "Kepemilikan Manajemen, Kepemilikan Institusi, Leverage dan Corporate Social Responsibility". Makalah disampaikan pada *Simposium Nasional Akuntansi XII*. Puwokerto.
- Rouf, M. A., Al Harun, A. (2011). Ownership structure and Voluntary Disclosure in Annual Reports of Bangladesh, *pak.j.commer.soc.sci*. vol.5 (1), 129-139.
- Salinan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No.347/BL/2012. Tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten atau perusahaan-perusahaan public yang membahas tentang pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) dalam rangka program konvergensi PSAK ke International Financial Reporting Standard (IFRS).
- Scheifer A dan R Vishny. 1997. A survey of corporate governance. *Journal of Finance*. 52(2): 737-783.
- Scott, William R. 2000. *Financial Accounting Theory*. USA : Prentice-Hall.

- Setiawan, Anita. C. 2007. "Pengaruh Mekanisme Corporate Governance terhadap Kinerja Perusahaan (Tobin's Q)". *Skripsi Sarjana (tidak Dipublikasikan). Fakultas Ekonomi UNDIP: Semarang.*
- Shleifer, Andrei dan Vishny, Robert W. (1997). "A Survey of Corporate Governance." *Journal of Finance*. Vol. 52 No. 2: 737-783.
- Singh, M. dan W.N. Davidson III. 2003."Agency Costs, Ownership Structure and Corporate Governance Mechanisms." *Journal of Banking & Finance*, Vol 27, pp. 793-816.
- Siregar, Sylvia Veronica and Utama, Sidharta. 2008. Type of earnings management and the effect of ownership structure, firm size, and corporate-governance practices : Evidence from Indonesia, *The International Journal of Accounting*, 43:1-27.
- Siregar, Veronica Sylvia N.P. dan Siddharta Utama, "Pengaruh Struktur Kepemilikan, Ukuran Perusahaan, dan Praktek Corporate Governance Terhadap Pengelolaan Laba (Earnings Management)", Simposium Nasional Akuntansi VII, Solo, 2005.
- Situmorang, Murni Ana Sulfia. (2011). *Transisi Menuju IFRS dan Dampaknya Terhadap Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Listing di BEI)*. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Solomon, Jill. 2007. *Corporate Governance and Accountability*, 2nd Edition. John Wiley & Sons, Ltd.
- Subroto, Bambang. 2003. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan kepada Ketentuan Pengungkapan Wajib oleh Perusahaan-perusahaan Publik dan Implikasinya terhadap Kepercayaan para Investor di Pasar Modal. *Disertasi*. Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Suhardjanto, Djoko dan Aryane Dewi. 2011. *Pengungkapan Risiko Finansial dan Tata Kelola Perusahaan : Studi Empiris Perbankan Indonesia*. Jurnal Keuangan dan Perbankan. Vol. 15 No. 1 Januari 2011, hlm. 105-118.
- Sunyoto, Danang, "Analisis Regresi dan Uji Hipotesis", Edisi Ke-1, CAPS, 2011.
- Syahrul, Y. 2002. *Bapepam: Kasus Kimia Farma Merupakan Tindak Pidana*. <http://www.tempo.co.id/hg/ekbis/2002/11/04/brk,20021104-36,id.html>. Diakses 19 September 2014.

- Tim Studi Pengkajian Penerapan Prinsip-Prinsip OECD 2004 Dalam Peraturan Bapepam Mengenai Corporate Governance, *"Studi Penerapan Prinsip-Prinsip OECD 2004 Dalam Peraturan Bapepam Mengenai Corporate Governance"*, 2006.
- Utama, Marta, *"Komite Audit, Good Corporate Governance dan Pengungkapan Informasi"*, Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 1, pp. 61-79, Departemen Akuntansi FEUI, 2004.
- Utami, W. D., Suhardjanto, D., S. Hartoko. 2012. "Investigasi Dalam Konvergensi IFRS Di Indonesia: Tingkat kepatuhan pengungkapan dan Kaitannya dengan Mekanisme *Corporate Governance*." *Simposium Nasional Akuntansi XV*.
- Verriest, Amt and Gaerenmycnck, Ann. 2010. Corporate Governance and Properties of TFRS Adoption. Canada: Queen's University.
- Wahidawati.2002. Kepemilikan Manajerial dan Agency conflicts: Analisis persamaan Simultan Non linier dari Kepemilikan Manajerial, Penerimaan Risiko, kebijakan utang dan Kebijakan Dividen. Prosiding simposium nasional Akuntansi V, Semarang, 5-6 September, hlm.601-623.
- Wardhani, Ratna. 2006. "Mekanisme *Corporate Governance* dalam Perusahaan yang Mengalami Permasalahan Keuangan (*Financially Distressed Firms*)". *Simposium Nasional Akuntansi IX*.
- Wardhani, Ratna. 2006. Mekanisme Corporate governance dalam perusahaan yang mengalami Masalah Keuangan. SNA 9: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Widiastuti. 2004. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kelengkapan pengungkapan Laporan Keuangan pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta, *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*. 7(3): 351-366.
- Wulandari, Ndaruningputri. 2005. "Pengaruh Indikator Mekanisme Corporate Governance terhadap Kinerja Perusahaan Publik di Indonesia". *Thesis (Tidak Dipublikasikan)*. Program Pascasarjana UNDIP: Semarang.
- Yang, Ziyun, *"Compensation Disclosure and Information Transparency: Evidence From Regulation S-K 402(B)"*, A Dissertation Presented to The Faculty of the C.T. Bauer College of Business University of Houston, 2012.

- Yu, Julia. 2011. The Interaction of Voluntary and Mandatory Disclosure: Eviden from the SEC's Elimination of The IFRS – US GAAP Reconcilliation.
- Young, M. N., D. Ahlstrom, G. D. Bruton, dan E. S. Chan. 2001. The Resource Dependence, Service and Control Functions of Boards of Directors in Hongkong and Taiwanese Firms. *Asia Pacific Journal of Management*. 18: 223-244